

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang tidak hanya dialami oleh beberapa negara berkembang, namun juga bagi beberapa negara maju yang telah memiliki sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang memadai. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, salah satunya yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak menyebabkan Indonesia mengalami beberapa masalah sosial seperti kemiskinan. Kemiskinan dapat diuraikan dari beberapa penyebab terdiri dari dua macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu unsur dari budaya yang terdapat disuatu daerah tertentu berdasarkan factor adat yang dimiliki di daerah tersebut, sehingga sedikitnya bisa dikurangi dengan menghindari factor adat istiadat yang mempengaruhinya untuk bisa terlepas dari kemiskinan itu sendiri. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu keadaan dimana masyarakat yang tidak layak terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada keadaan yang sangat lemah akan akses dan mengembangkan diri mereka sendiri dari tingkat kemiskinan. Menurut Sharp (dalam Mudrajad Kuncoro, 2006) terdapat tiga factor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk

miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas dalam sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang ada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Kemiskinan memang bukan hanya persoalan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi. Tetapi, berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, serta ketidakmampuannya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta sebagai masalah yang berhubungan dengan pembangunan manusia. Dalam memahami permasalahan kemiskinan di Indonesia, perlu di perhatikan dari kegiatan sehari-hari yang ada di masing-masing daerah, yaitu dari kemiskinan pada tingkat daerah yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Dengan begitu pemecahan masalah dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih objektif dan tepat sarannya. Sebagai Negara berkembang, Indonesia telah mendapatkan banyak prestasi yang membanggakan dalam menanggulangi masalah kemiskinan selama periode tahun 1976 sampai awal krisis ekonomi orde baru tahun 1997. Pada tahun 1976 jumlah orang yg dikatakan miskin mencapai 54,2 juta jiwa atau 40,1% dari jumlah penduduk dan pada tahun 2004 jumlah orang yang dikatakan miskin sekitar 36,1 juta jiwa atau 16,66% dari jumlah penduduk (BPS,2005).

Pembangunan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa, tidak lepas dari masalah kemiskinan. Dari data Badan Pusat Statistik, masalah kemiskinan di Indonesia terletak pada pulau jawa, terutama di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan selama ini pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa hanya dirasakan oleh golongan masyarakat tertentu dan tidak merata kesemua msyarakat.

Tabel 1.1
Persentase penduduk miskin di Pulau Jawa tahun 2011-2017

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
DKI Jakarta	3,75	3,7	3,72	4,09	3,61	3,75	3,78	3,77
Jawa Tengah	15,76	14,98	14,44	13,58	13,32	13,19	12,23	14,42
Jawa Barat	10,57	9,88	9,61	9,18	9,53	8,95	8,71	9,55
Jawa Timur	14,23	13,08	12,73	12,28	12,28	11,85	11,2	14,63
DI Yogyakarta	16,08	15,88	15,03	14,55	13,16	13,1	12,36	12,74
Banten	6,32	5,71	5,89	5,51	5,75	5,36	5,59	5,75

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1.1 menunjukkan persentase penduduk miskin di Pulau Jawa tahun 2011-2017. Secara umum dilihat dari tahun 2011-2017 perentase penduduk miskin tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 14,63 persen, dan penduduk miskin terendah di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,77 persen. Rata-rata

penduduk miskin di Jawa Barat 9,55 persen, yang merupakan terbesar ke empat setelah Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Menurut BPS rata-rata jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Barat sebesar 4.392,55 ribu jiwa dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 9,61 persen. Berikut data jumlah dan Persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2017.

Tabel 1.2
Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat, 2011–2017.

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah (Juta Jiwa)	Persentase
2011	4,650	10,57
2012	4,421	9,88
2013	4,382	9,61
2014	4,238	9,18
2015	4,485	9,53
2016	4,168	8,95
2017	3,774	8,71

*Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Berdasarkan pada Tabel 1.2 Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun 2011-2017. Jumlah maupun persentase penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2012 yakni sebesar 4,421 juta jiwa dan 9,88

pesen dan pada tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan sebesar 9,53 persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 8,95 persen dan pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 8,71 persen. Untuk sekarang provinsi Jawa Barat secara bertahap sudah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Strategi untuk mengurangi kemiskinan itu dilakukan dengan pelaksanaan program-program pro rakyat dan memberikan fasilitas yang memadai agar mampu memenuhi dan mengakses berbagai pelayanan kebutuhan masyarakat seperti halnya dalam program JKBM, simantri, bedah rumah dan lain sebagainya.

Pendidikan adalah upaya paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sosial ekonomi, kesehatan dan gizi yang baik tidak akan dapat bertahan tanpa adanya manusia yang memiliki pendidikan yang berkualitas. Pemerintah melakukan kebijakan wajib belajar 9 tahun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar masyarakat Indonesia menjadi SDM yang berkualitas, selain itu juga agar dapat mengurangi kemiskinan dan yang ada dengan banyaknya orang-orang yang dapat mengenyam pendidikan untuk merubah taraf kehidupannya.

Tabel 1.3

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2017

Tahun	Rata-rata lama Sekolah (tahun)
2011	8,02
2012	8,06
2013	8,08
2014	8,11
2015	7,86
2016	7,95
2017	8,14

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat

Pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa Rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Barat dalam tujuh tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2011 sebesar 8,02 pertahun dan mengalami kenaikan di tahun 2012 sebesar 8,06 pertahun dan mengalami kenaikan padah tahun 2013 sebesar 8,08 dan pada tahun 2014 kembali mengalami kenaikan sebesar 8,11 pertahun dan pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 7,86 pertahun dan pada

tahun 2016 kembali mengalami kenaikan sebesar 7,95 pertahun dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 8,14 pertahun.

Tabel 1.4

Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum di Provinsi Jawa Barat tahun

2011-2017

Tahun	Tingkat Pengangguran	Upah Minimum
	(%)	(Rupiah)
2011	10,01	732.000
2012	9,84	780.000
2013	8,88	850.000
2014	8,66	1.000.000
2015	8,40	1.000.000
2016	8,57	2.250.000
2017	8,49	1.400.000

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat

Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat mengalami naik turun di setiap tahunnya . dapat dilihat dari table 1.4 tingkat pengangguran ditahun 2011 sebesar 10,01 persen dan mengalami penurunan ditahun 2012 menjadi 9,84 persen, hingga 2015 turun menurun hingga 8,40 persen, sedangkan 2016

mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar menjadi 8,57 persen, kemudian di tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 8,49 persen,

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah upah minimum, kondisi upah di setiap daerah di Jawa Barat berbeda-beda di setiap kabupaten dan kotanya. Upah minimum yang sangat rendah dapat mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS dalam table 1.2 upah minimum Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 sebesar 732.000 ribu rupiah dan mengalami peningkatan ditahun 2012 sebesar 780.000 ribu, dan ditahun 2013 mengalami peningkatan lagi sebesar 850.000 ribu rupiah dan meningkat lagi pada tahun 2014 sebesar 1.000.000 ribu rupiah dan ditahun 2015 tidak mengalami peningkatan masih sama dengan tahun 2014 sebesar 1.000.000 ribu rupiah dan ditahun 2016 mengalami peningkatan lagi sebesar 2.250.000 ribu rupiah dan pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 1.400.000 ribu rupiah. Meskipun rata-rata disetiap tahunnya upah minimum meningkat namun kenyataannya hal ini tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Upaya penanggulangan di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui lima kebijakan yaitu: pertama pengangguran kemiskinan dapat dilakukan secara sistemik, serentak dan bersinergi banyak pihak dengan dukungan lintas pemerintah. Kedua perlunya upaya pendampingan kepada masyarakat miskin dalam memberikan pemahaman untuk lepas dari kemiskinan. Ketiga perlunya kesepakatan dari kepala OPD/Biro (Organisasi Perangkat Daerah) harus berorientasi pada pengangguran kemiskinan. Keempat pengangguran kemiskinan

melalui bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, pendampingan kemandirian, pengembangan usaha produktif mandiri, serta program CSR/TJSL (Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) dengan kemitraan bersama masyarakat. Kelima Jawa Barat sebagai alat kendali penanggulangan kemiskinan berbasis individu dengan data spasial dan a-spasial, untuk mempaermudah pencarian data perindividu (BAPPEDA Jawa Barat, 2014)

Maka, peneliti tertarik untuk meneliti Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kemiskinan relatif trendah dibandingkan daerah lain. Mengapa kemiskinan di Jawa Barat Rendah? Faktor Pendidikan, Pengangguran atau Upah Minimum yang menyebabkan kemiskinan rendah di Provinsi Jawa Barat. Mengembangkan faktor yang diyakini mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan yang meliputi, Pendidikan, Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum Kabupaten atau Kota. Sehingga judul penelitian yang diambil oleh peneliti adalah **“ Analisis Pengaruh Pendidikan, Tongkat Pengangguran Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2017”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan antara Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2017 ?
2. Bagaimana hubungan antara Tingkat Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2017 ?
3. Bagaimana hubungan antara Upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengenai latar belakang dan rumusan masalah dimaksudkan ialah:

1. Menganalisis bagaimana hubungan antara Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2017.
2. Menganalisis bagaimana hubungan antara Tingkat Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2017.
3. Menganalisis bagaimana hubungan antara Upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menganalisis variable, Pendidikan, Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum Provinsi mengenai tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan adalah:

1. Bermanfaat bagi berbagai pihak yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang pengaruh Pendidikan, Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum Provinsi mengenai Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi pihak pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
3. Dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya.
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber pustaka dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kemiskinan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini sistematika yang disusun dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi..

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas dan berisi tentang hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan pada topik yang sama sehingga dapat dijelaskan perbedaan sekaligus menghindari duplikasi dan berisi teori-teori yang

diperoleh dari studi pustaka. Teori-teori ini akan digunakan sebagai landasan bagi penulis untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang jenis-jenis data yang digunakan dan bagaimana cara pengumpulan data dan metode analisa yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan data penelitian dan menyajikan hasil analisis yang diperoleh serta pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini akan dijelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa dalam penelitian ini dan implikasi yang muncul dari simpulan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam memecahkan masalah penelitian.